

Address : Tuesday Block No. 76 Rt/Rw 01/003  
Jatitengah Village, Jatitujuh District, Majalengka  
Regency, West Java


Email : arjijournal@gmail.com


Contact : 0821-4250-1527


Available at:

<https://journal.nahnuinisiatif.com/index.php/ARJI>

Volume 7 Number 2 Year 2025

 DOI : 10.61227

 E-ISSN : 2775-0787

 P-ISSN : 2774-9290



## Reaktualisasi Dakwah Politik di Indonesia: Antara Warisan Khilafah dan Realitas Demokrasi Modern

954 – 975

### Reactualization of Political Da'wah in Indonesia: Between the Legacy of the Caliphate and the Reality of Modern Democracy

Artikel dikirim :

2025-05-12

Artikel diterima :

2025-05-26

Artikel diterbitkan :

2025-05-31

 Nanang Hermawan<sup>1\*</sup>, Ahmad Murjoko<sup>2</sup>

 <sup>1,2</sup> STAI Haji Agus Salim Cikarang

 Email Correspondence : [nanang.hermawan@staihas.ac.id](mailto:nanang.hermawan@staihas.ac.id)

#### Kata Kunci:

Dakwah politik, khilafah, demokrasi, pluralisme, integrasi nilai Islam.

**Abstrak:** Ketegangan antara gagasan formalisasi sistem khilafah dan realitas demokrasi modern terus membayangi ruang dakwah politik di Indonesia. Dalam konteks masyarakat yang plural dan berlandaskan Pancasila, dakwah politik menjadi arena kontestasi antara pendekatan tekstual-normatif dan pendekatan substansial-kontekstual dalam menyuarakan nilai-nilai Islam di ruang publik. Penelitian ini bertujuan untuk merumuskan model reaktualisasi dakwah politik yang responsif terhadap dinamika sosial, budaya, dan politik Indonesia kontemporer. Dengan menggunakan metode kualitatif deskriptif berbasis studi pustaka terhadap sumber primer dan sekunder, penelitian ini dilaksanakan selama bulan Januari hingga April 2025. Subjek kajian meliputi wacana-wacana pemikiran tokoh dan organisasi dakwah politik di Indonesia, baik yang mengusung ideologi khilafah maupun yang mendukung demokrasi substantif. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui dokumentasi literatur akademik dan analisis wacana, sedangkan analisis data menggunakan pendekatan historis-kritis dan kontekstual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dakwah politik yang transformatif dan berakar pada nilai-nilai *maqashid al-shari'ah* memiliki potensi besar untuk memperkuat etika publik, keadilan sosial, serta pemberdayaan masyarakat sipil. Model dakwah seperti ini dapat

menjembatani idealisme Islam politik dengan prinsip-prinsip demokrasi secara konstruktif. Penelitian ini berkontribusi dalam memperkaya khazanah pemikiran dakwah kontemporer serta memberikan landasan normatif dan strategis bagi pengembangan dakwah politik yang lebih inklusif dan solutif di Indonesia.

**Keywords:**

Political da'wah, caliphate, democracy, pluralism, integration of Islamic values.

**Abstract:** The tension between the idea of formalizing the caliphate system and the reality of modern democracy continues to overshadow the political da'wah space in Indonesia. In the context of a plural society based on Pancasila, political da'wah is an arena of contestation between textual-normative approaches and substantial-contextual approaches in voicing Islamic values in the public sphere. This research aims to formulate a model of political da'wah reactualization that is responsive to the social, cultural, and political dynamics of contemporary Indonesia. Using a descriptive qualitative method based on a literature study of primary and secondary sources, this research was carried out from January to April 2025. The subject of the study includes the discourses of the thoughts of political da'wah figures and organizations in Indonesia, both those that carry the ideology of the caliphate and those that support substantive democracy. Data collection techniques are carried out through academic literature documentation and discourse analysis, while data analysis uses historical-critical and contextual approaches. The results of the study show that political da'wah that is transformative and rooted in the values of maqashid al-shari'ah has great potential to strengthen public ethics, social justice, and civil society empowerment. This model of da'wah can bridge political Islamic idealism with democratic principles constructively. This research contributes to enriching the treasures of contemporary da'wah thought and provides a normative and strategic foundation for the development of more inclusive and solutive political da'wah in Indonesia.

Copyright © 2025 authors

This is an open-access article under the CC BY-NC-SA 4.0



This work is licenced under a [Creative Commons Attribution-nonCommercial-shareAlike 4.0 International Licence](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/)

Available at : <https://journal.nahnuinisiatif.com/index.php/ARJI/article/view>



DOI : 10.61227



P-ISSN : 2774-9290



E-ISSN : 2775-0787



## PENDAHULUAN

Dakwah memiliki peran yang sangat penting dalam dinamika keislaman, tidak hanya sebagai media penyebaran ajaran agama tetapi juga dalam membentuk kesadaran sosial dan politik umat (April et al., 2025). Di Indonesia, negara yang memiliki keragaman agama, budaya, dan etnis, dakwah politik menjadi fenomena yang terus berkembang dan diperdebatkan. Di satu sisi, dakwah politik berfungsi sebagai wadah perjuangan nilai-nilai keadilan dan kesejahteraan sosial. Namun, di sisi lain, ia sering menjadi ajang kontestasi ideologi antara gagasan normatif Islam politik dengan prinsip-prinsip demokrasi yang telah menjadi dasar konstitusional negara (Wahyudi, 2024).

Sejarah panjang khilafah dalam dunia Islam menjadi sumber inspirasi bagi sebagian kalangan untuk memperjuangkan formalisasi syariat dalam sistem kenegaraan (D. W. Kusuma, 2025). Namun, di tengah realitas Indonesia yang berlandaskan pada Pancasila dan UUD 1945, aspirasi ini sering memunculkan ketegangan. Ketegangan tersebut muncul antara semangat purifikasi ideologis dan tuntutan pragmatis dalam menjaga kohesi sosial serta nasionalisme (Dalmeri, 2023). Oleh karena itu, penting untuk merefleksikan kembali relevansi dakwah politik dalam konteks demokrasi yang pluralistik.

Dakwah politik seharusnya dipahami sebagai upaya transformasi sosial yang menekankan etika publik, partisipasi aktif warga negara, dan penguatan masyarakat sipil. Pendekatan substantif terhadap syariat Islam, dengan penekanan pada maqasid al-shari'ah (tujuan-tujuan syariat), lebih dibutuhkan ketimbang pendekatan simbolik yang berfokus pada formalisasi hukum (Widoyo & Islamy, 2022). Dengan pendekatan ini, dakwah tidak hanya menyuarakan idealisme normatif tetapi juga dapat memberikan solusi terhadap kebutuhan konkret umat melalui narasi yang inklusif dan progresif.

Penulis menganalisis penelitian-penelitian terdahulu mengenai reaktualisasi dakwah politik di Indonesia, dengan fokus pada hubungan antara warisan khilafah dan realitas demokrasi modern, yang berjudul *"Islamic Revivalism in Indonesia: The Caliphate, Sharia, NKRI, Democracy, and the Nation-State"* (Munabari et al., 2020). Penelitian ini menganalisis pandangan gerakan revivalisme Islam di Indonesia terhadap konsep negara-bangsa dan demokrasi. Penelitian ini mencakup kelompok seperti Hizbut Tahrir Indonesia (HTI), Front Pembela Islam (FPI), dan Majelis Mujahidin Indonesia (MMI), yang mengusung ideologi khilafah dan syariah. Penelitian ini menunjukkan bahwa meskipun mereka menginginkan penerapan syariah, pemahaman mereka tentang konsep negara-bangsa dan demokrasi berbeda-beda. Namun, penelitian ini lebih fokus pada gerakan revivalisme Islam dan ideologi khilafah, namun tidak mendalam pada reaktualisasi dakwah politik dalam konteks Indonesia saat ini. Artikel ini juga lebih mengutamakan ideologi dan gerakan daripada perubahan bentuk dakwah dalam praktik sosial-politik sehari-hari di Indonesia.

Penelitian selanjutnya berjudul *"Dialektika Khilafah dan Politik Kebangsaan dalam Media Publik Siber"* (Jauhari et al., 2021). Studi ini mengeksplorasi dialektika antara ideologi khilafah dan sistem politik kebangsaan Indonesia yang diekspresikan melalui

media siber dua komunitas agama, yaitu komunitas Islam Kaffah dan Nahdlatul Ulama (NU). Studi ini menunjukkan bahwa proses dialektika ini cenderung menciptakan konsensus, meskipun ada perbedaan pandangan tentang penerapan khilafah dalam konteks nasional. Akan tetapi fokus artikel ini pada media siber membatasi ruang lingkupnya hanya pada persepsi publik dan diskursus media terkait khilafah dan Pancasila, sedangkan dakwah politik tidak hanya terjadi melalui media, tetapi juga dalam kegiatan langsung. Sehingga reaktualisasi dakwah politik dalam konteks Indonesia lebih luas dari sekadar diskursus di media dan mencakup berbagai dimensi praktis dalam masyarakat.

Adapun menurut (Tanjung & Rambe, 2023) dalam penelitiannya yang berjudul "*Khilafah Islamiyah Versus Pancasila Studi Ideologi dan Penerapannya Di Indonesia*" membandingkan ideologi khilafah Islamiyah dengan Pancasila sebagai dasar negara Indonesia. Studi ini menunjukkan bahwa meskipun kedua ideologi memiliki tujuan untuk mempromosikan persatuan dan keadilan, akan tetapi pancasila memiliki pendekatan yang lebih komprehensif dan diterima secara luas dalam sistem politik dan hukum Indonesia. Artikel ini lebih fokus pada perbandingan ideologi khilafah dan Pancasila tanpa menyoroti dinamika dakwah politik yang sebenarnya terjadi dalam masyarakat, pembahasannya cenderung lebih teoretis dan tidak menggali secara langsung bagaimana praktek dakwah politik di Indonesia dipengaruhi oleh konteks demokrasi modern.

Penelitian terdahulu menunjukkan adanya sejumlah keterbatasan dalam cakupan objek kajian, pendekatan metodologi, serta kedalaman analisis yang dihasilkan terkait dakwah politik di Indonesia. Banyak penelitian yang lebih fokus pada ideologi atau gerakan politik Islam tanpa membahas secara mendalam bagaimana dakwah politik bertransformasi dalam konteks demokrasi modern di Indonesia. Keterbatasan-keterbatasan ini menciptakan ruang bagi penelitian lebih lanjut yang dapat memberikan kontribusi signifikan dalam pengembangan ilmu dan praktik dakwah. Dalam konteks ini, penelitian ini hadir untuk mengisi celah yang belum terjawab dengan menghadirkan kajian yang lebih spesifik dan mendalam mengenai reaktualisasi dakwah politik di Indonesia, dengan menyoroti hubungan antara warisan khilafah dan realitas demokrasi modern yang ada.

Dengan mengusung judul "*Reaktualisasi Dakwah Politik di Indonesia: Antara Warisan Khilafah dan Realitas Demokrasi Modern*", studi ini bertujuan untuk menawarkan pendekatan yang lebih komprehensif dan berbasis konteks dalam menganalisis peran dakwah politik di Indonesia. Penelitian ini tidak hanya mengatasi keterbatasan dalam kajian sebelumnya, tetapi juga menghadirkan kebaruan konseptual dan praktis yang lebih relevan dalam memahami transformasi dakwah politik dalam konteks demokrasi modern. Melalui penelitian ini, diharapkan dapat memberikan kontribusi signifikan dalam pengembangan pemikiran politik Islam di Indonesia, khususnya terkait dengan hubungan antara warisan khilafah dan dinamika politik kontemporer yang berkembang di masyarakat.

Penelitian ini juga bertujuan untuk mengeksplorasi bagaimana dakwah politik di Indonesia dapat berkembang ke arah yang lebih integratif. Model dakwah politik yang

diusulkan harus tetap menjaga semangat keislaman sekaligus menghormati prinsip-prinsip demokrasi yang berlaku (Suhaimi & Amin, 2022). Dalam konteks ini, pendekatan pendidikan memiliki peran penting, baik sebagai wahana internalisasi nilai-nilai dakwah politik yang moderat maupun sebagai instrumen peningkatan kesadaran kritis umat. Pendidikan Islam yang berbasis pada nilai inklusivitas, partisipasi, dan keadaban publik dapat menjadi fondasi utama dalam membentuk generasi yang mampu meneruskan dakwah politik secara substantif, rasional, dan berorientasi pada kemaslahatan bangsa.

## METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode studi literatur sebagai kerangka utama dalam menelusuri dinamika reaktualisasi dakwah politik di Indonesia (Suhaimi & Amin, 2022). Pendekatan ini dipilih karena dinilai paling relevan untuk memahami secara mendalam konstruksi pemikiran, narasi historis, dan realitas kontemporer yang mengiringi perjumpaan antara warisan Khilafah dan sistem demokrasi modern.

Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan secara sistematis melalui penelusuran berbagai sumber literatur yang memenuhi kriteria inklusi tertentu guna menjamin validitas akademik dan keterkaitan langsung terhadap fokus kajian. Literatur yang digunakan mencakup buku-buku akademik, artikel jurnal ilmiah, dokumen kebijakan, serta publikasi media terpercaya yang relevan dengan tema dakwah politik, wacana khilafah, dan perkembangan demokrasi di Indonesia (Bistara, 2021). Kriteria inklusi dalam pemilihan sumber meliputi beberapa hal, yaitu:

1. Rentang waktu publikasi dibatasi pada lima tahun terakhir, yakni dari tahun 2020 hingga 2025, untuk menjamin aktualitas dan kesesuaian dengan konteks sosial-politik terkini di Indonesia.
2. Hanya literatur dari sumber yang kredibel dan terindeks secara akademik yang digunakan. Artikel jurnal yang dijadikan rujukan berasal dari basis data terpercaya seperti Google Scholar, SINTA, DOAJ, Portal Garuda, serta repositori perguruan tinggi, khususnya perguruan tinggi keislaman negeri seperti UIN.
3. Seleksi literatur dilakukan berdasarkan relevansi substansial dengan tema penelitian, yakni mencakup isu-isu tentang transformasi dakwah politik, ideologi khilafah, hubungan Islam dan negara, serta integrasi nilai-nilai Islam dalam demokrasi konstitusional.

Dari hasil seleksi tersebut, diperoleh sebanyak 32 artikel jurnal ilmiah yang dijadikan rujukan utama, disertai 6 buku akademik primer, di antaranya karya-karya pemikir seperti Nurcholish Madjid, Fazlur Rahman, Asef Bayat, serta buku klasik keislaman seperti *al-Ahkam al-Sultaniyyah* karya al-Mawardi, yang memberikan konteks historis terhadap konsep khilafah.



**Gambar 1. Desain Alur Penelitian**

Dengan pendekatan ini, penelusuran literatur dalam penelitian ini tidak hanya menjamin keluasan informasi, tetapi juga kedalaman analisis yang mendukung argumentasi teoretis dan konseptual tentang reaktualisasi dakwah politik dalam konteks Indonesia modern. Penelusuran ini juga membuka peluang untuk mengidentifikasi celah kajian yang belum banyak disentuh oleh penelitian terdahulu, khususnya dalam kaitannya dengan integrasi antara dakwah politik, demokrasi, dan pendidikan Islam.

Analisis data dilakukan menggunakan pendekatan historis-kritis dan kontekstual. Pendekatan historis digunakan untuk memetakan akar-akar historis pemikiran politik Islam, khususnya konsep khilafah, serta transformasinya pasca runtuhnya Kekhalifahan Utsmaniyah. Sementara itu, pendekatan kontekstual digunakan untuk memahami bagaimana konsep-konsep tersebut mengalami adaptasi, pergeseran, atau bahkan resistensi dalam kerangka negara-bangsa demokratis seperti Indonesia (Marzuki, 2021).

Melalui strategi ini, penelitian berupaya mengungkap bagaimana dakwah politik tidak hanya menjadi warisan ideologis masa lalu, tetapi juga terus mengalami pembaruan makna dan bentuk dalam menjawab tantangan zaman. Dengan demikian, studi ini diharapkan dapat memberikan kontribusi konseptual yang lebih tajam serta membuka ruang diskusi akademik yang lebih luas dalam kajian politik Islam dan transformasi dakwah di era demokrasi.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Warisan Khilafah Antara Cita-Cita Teologis dan Realitas Historis

Dalam diskursus politik Islam klasik, khilafah diposisikan sebagai institusi tertinggi dalam struktur sosial-politik umat Islam, yang secara normatif melanjutkan misi kerasulan dalam menjaga syariat dan mengatur kehidupan publik berdasarkan hukum ilahi (Marzuki, 2021). Tokoh-tokoh besar seperti Abu al-Hasan al-Mawardi dalam *al-Ahkam al-Sultaniyyah* dan Ibn Khaldun dalam *al-Muqaddimah* menjabarkan khilafah sebagai institusi yang tidak hanya menyatukan umat secara politis, tetapi juga menjadi pranata moral untuk memastikan berjalannya keadilan dan ketertiban publik (Ahmad, 2019). Al-Mawardi, misalnya, menekankan pentingnya syarat-syarat etis dan legal bagi seorang khalifah sebagai pemimpin yang bertanggung jawab di hadapan Allah dan umat, sementara Ibn Khaldun menguraikan khilafah dalam kerangka *'asabiyyah* dan dinamika sosiologis kekuasaan (Hanif, 2022).

Namun, realitas historis menunjukkan bahwa institusi khilafah mengalami transformasi yang tidak selalu sejalan dengan konstruksi teoretis para ulama klasik. Sejak transisi dari *Khulafaur Rasyidin* ke Bani Umayyah, khilafah mengalami pergeseran paradigmatik dari musyawarah umat menuju monarki dinastik. Sistem pewarisan kekuasaan menggantikan legitimasi kolektif, dan perangkat militer menjadi instrumen utama dalam stabilisasi serta ekspansi kekuasaan (Ningsih, 2022). Sejarah memperlihatkan inkonsistensi antara ideal normatif khilafah dan praktik empiriknya. Dalam hal ini, pendidikan sejarah Islam yang kontekstual perlu memberikan ruang kritis kepada peserta didik untuk memahami dinamika tersebut, tidak hanya sebagai fakta historis, tetapi juga sebagai pelajaran etis-politik dalam mengelola kekuasaan dan kepemimpinan.

Memasuki era modern, terutama pasca pembubaran Khilafah Utsmaniyah oleh Mustafa Kemal Atatürk pada 1924, gagasan khilafah mengalami revivalisme dalam spektrum gerakan Islam politik (Munabari et al., 2020). Kelompok seperti Hizbut Tahrir mengajukan pemulihan sistem khilafah universal sebagai satu-satunya solusi bagi disintegrasi dan kehancuran umat Islam. Dalam perspektif mereka, umat tidak akan pernah mencapai kejayaan tanpa otoritas sentral yang menaungi seluruh dunia Muslim dalam satu sistem hukum dan politik yang bersumber dari syariat. Namun, revivalisme ini sering mengabaikan kompleksitas realitas geopolitik, pluralisme masyarakat Muslim kontemporer, dan dinamika negara-bangsa modern (Yumitro, 2018). Di sinilah pendidikan agama Islam (PAI) di sekolah dan perguruan tinggi memiliki fungsi strategis sebagai ruang dialog pemikiran, di mana peserta didik dapat dikenalkan pada keragaman pandangan Islam politik, sekaligus membangun nalar kritis terhadap wacana ideologis yang rigid.

Kritik terhadap wacana khilafah revivalistik juga datang dari kalangan sarjana Muslim progresif seperti Fazlur Rahman, Nurcholish Madjid, dan Asef Bayat, yang menekankan pentingnya memahami konteks perubahan zaman, urgensi demokratisasi, dan transformasi makna keislaman dalam ruang publik global (Hawi, 2019). Di

lingkungan pendidikan, khususnya pendidikan tinggi Islam, pemikiran-pemikiran progresif ini harus menjadi bagian dari referensi utama dalam pendidikan pemikiran Islam kontemporer. Melalui kajian seperti ini, peserta didik tidak hanya memahami wacana keagamaan sebagai dogma, tetapi juga sebagai medan interpretasi yang dinamis dan responsif terhadap perubahan sosial.

Di Indonesia, gagasan khilafah menghadapi tantangan serius, baik dari segi legalitas konstitusional maupun dari konsensus sosiologis kebangsaan. Negara ini dibangun atas dasar Pancasila, yang menjamin kebebasan beragama sekaligus menolak dominasi ideologi tunggal berbasis agama (Tanjung & Rambe, 2023). Wacana khilafah yang dipromosikan oleh sebagian kelompok Islam politik sering kali dipersepsi sebagai ancaman terhadap integrasi nasional dan keberagaman identitas bangsa. Oleh karena itu, reaktualisasi khilafah dalam konteks Indonesia tidak dapat dilakukan melalui restorasi struktur institusional khilafah secara formal, melainkan melalui internalisasi nilai-nilai etik-politik yang terkandung dalam khilafah sebagai prinsip moral, bukan sebagai sistem kekuasaan rigid (Abdillah, 2024). Maka dari itu, pendidikan kewarganegaraan dan pendidikan Pancasila perlu diintegrasikan dengan perspektif Islam *wasathiyah* agar siswa dan mahasiswa dapat menjembatani identitas keislaman mereka dengan komitmen kebangsaan.

Cendekiawan Muslim Indonesia seperti Azyumardi Azra dan Harun Nasution telah lama mengajukan tafsir kontekstual terhadap nilai-nilai politik Islam, termasuk khilafah. Menurut Azra, khilafah klasik lebih tepat dipahami sebagai ekspresi historis dari konteks Arab abad pertengahan, dan karenanya tidak layak diadopsi secara literal dalam masyarakat modern yang plural dan demokratis (Murtadha, 2022). Sementara itu, Harun Nasution menekankan pentingnya pemisahan antara agama sebagai nilai dan agama sebagai institusi politik, yang jika dipaksakan dalam bentuk negara teokratis justru akan mengerdilkan Islam sebagai rahmatan lil 'alamin (Syafuri, 2025).

Reaktualisasi khilafah di Indonesia seharusnya diarahkan kepada penguatan substansi nilai-nilai Islam dalam ranah politik dan pemerintahan: keadilan ('adl), akuntabilitas (*amanah*), partisipasi (*shura*), dan kepedulian terhadap kaum mustadh'afin (*maslahah*). Nilai-nilai ini dapat dan seharusnya diintegrasikan ke dalam sistem demokrasi yang ada, bukan dengan menggantikan sistem tersebut, tetapi dengan memperkaya etika politik nasional dengan spiritualitas dan moralitas Islam (Aprilya & Tohawi, 2024). Pendidikan Islam, khususnya di madrasah, pesantren, dan sekolah tinggi agama Islam, dapat menjadi agen transformasi melalui internalisasi nilai-nilai ini dalam kurikulum akhlak politik dan etika kepemimpinan.

Nilai-nilai khilafah substantif dapat diterapkan melalui pendekatan *maqashid al-shari'ah* yang menekankan tujuan syariat, bukan bentuk formal hukumnya. Dalam pembelajaran, penting untuk mengganti narasi "negara Islam" sebagai sistem final dengan narasi "kepemimpinan profetik" yang menekankan pada integritas, keadilan, dan pelayanan. Hal ini sejalan dengan pendekatan *maqashid al-shari'ah* yang lebih mengedepankan tujuan-tujuan syariat ketimbang bentuk-bentuk formal hukumnya. Seorang politisi Muslim yang adil, transparan, dan berpihak kepada rakyat yang tertindas

adalah pengejawantahan *khilafah insaniyyah* sebuah konsep kepemimpinan manusia yang bertanggung jawab secara spiritual dan sosial.

Lebih lanjut, implementasi nilai-nilai khilafah substantif dalam konteks dakwah politik menuntut metode yang cerdas, inklusif, dan berorientasi kepada dialog lintas identitas. Bukan narasi eksklusif dan konfrontatif yang mengkafirkan sistem demokrasi, melainkan narasi etis-transformasional yang membangun jembatan antara nilai-nilai Islam dan prinsip-prinsip demokrasi modern (Bistara, 2021). Ini menjadi peluang bagi lembaga pendidikan untuk mengembangkan metode pembelajaran berbasis dialog lintas identitas, termasuk dalam forum-forum akademik dan kegiatan kemahasiswaan. Pendekatan seperti ini telah dilakukan oleh NU dan Muhammadiyah yang menjadikan demokrasi sebagai wahana dakwah sosial dan advokasi publik.

Dalam konteks ini, khilafah tidak lagi dimaknai sebagai entitas geopolitik, melainkan sebagai cita moral peradaban Islam, sebuah upaya berkelanjutan untuk menciptakan tatanan sosial-politik yang adil, inklusif, dan menjunjung tinggi martabat manusia. Ini adalah wajah baru dari dakwah politik Islam, bukan sebagai perebutan kekuasaan, melainkan sebagai pengabdian kepada nilai-nilai ilahiah di tengah tantangan realitas kontemporer (Nurfalah, 2022).

Dalam kerangka pendidikan, penting untuk mendorong pembelajaran yang menempatkan khilafah sebagai bagian dari diskursus etika politik Islam, bukan sebagai dogma ideologis yang harus direplikasi. Dengan demikian, pendidikan Islam berperan sebagai sarana utama untuk menginternalisasi nilai-nilai ilahiah dalam demokrasi kontemporer, serta sebagai penjaga keseimbangan antara spiritualitas keagamaan dan tanggung jawab kewarganegaraan.

### **Demokrasi dan Dakwah Politik Ruang Baru Partisipasi Umat**

Demokrasi dalam tatanan modern bukan sekadar sistem politik berbasis elektoral yang menjamin kebebasan sipil dan hak-hak politik warga negara. Ia juga merupakan ruang sosial-diskursif yang memungkinkan artikulasi identitas kolektif dalam bentuk yang lebih terbuka, dinamis, dan deliberatif. Dalam kerangka ini, demokrasi menjadi arena di mana individu dan kelompok dapat memperjuangkan aspirasi, keyakinan, dan nilai-nilai mereka secara setara, termasuk nilai-nilai keagamaan yang bersumber dari tradisi Islam (Rachman, 2020). Kondisi ini menuntut adanya literasi politik keagamaan dalam dunia pendidikan, terutama pada mata pelajaran Pendidikan Agama Islam (PAI) dan Pendidikan Kewarganegaraan, guna membentuk pemahaman yang utuh dan kritis tentang relasi antara agama dan negara dalam demokrasi.

Khusus dalam konteks Indonesia, negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia, demokrasi telah menjadi medium penting bagi ekspresi politik Islam, termasuk dalam bentuk dakwah politik. Reformasi 1998 menjadi titik balik historis yang tidak hanya mengakhiri otoritarianisme negara Orde Baru, tetapi juga menandai dibukanya kembali ruang publik bagi keterlibatan umat Islam dalam politik secara legal, terbuka, dan institusional. Dalam periode pasca reformasi, kita menyaksikan munculnya partai-partai

berbasis Islam seperti PKS, PPP, dan PAN, serta menguatnya peran organisasi masyarakat Islam seperti NU dan Muhammadiyah dalam wacana publik nasional (Nasuhaidi & Subekti, 2024). Fenomena ini seharusnya direfleksikan dalam kurikulum pendidikan Islam untuk memperkenalkan sejarah perkembangan politik Islam Indonesia secara jujur, terbuka, dan akademis.

Pembukaan ruang ini tidak hanya memberi kesempatan bagi umat Islam untuk menyuarakan nilai-nilai Islam melalui mekanisme demokratis, tetapi juga memungkinkan terjadinya proses transformasi gagasan keislaman itu sendiri dari bentuk eksklusif dan normatif ke bentuk yang lebih inklusif, dialogis, dan kontekstual. Transformasi ini perlu dijadikan bagian penting dalam pendidikan Islam, agar peserta didik tidak hanya melihat Islam sebagai aturan normatif, tetapi juga sebagai nilai-nilai etik yang hidup dalam masyarakat plural.

Cendekiawan Muslim Indonesia, seperti Nurcholish Madjid, Syafi'i Ma'arif, dan M. Amin Abdullah, telah merumuskan ulang kerangka teoretis hubungan antara Islam dan demokrasi, dengan menekankan bahwa keduanya tidaklah bertentangan secara inheren. Islam, dalam pendekatan ini, tidak diposisikan sebagai ideologi kekuasaan yang menegasikan demokrasi, tetapi sebagai sumber nilai etis dan spiritual yang memperkaya demokrasi dengan dimensi moral dan kemanusiaan (Abas & Gulerce, 2025). Karenanya, penting bagi lembaga pendidikan tinggi Islam untuk menjadikan pemikiran tokoh-tokoh ini sebagai bagian dari literatur wajib dalam studi keislaman kontemporer.

Namun, demokrasi tidak bebas dari paradoks. Di satu sisi, ia membuka peluang partisipasi politik umat secara luas dan egaliter. Di sisi lain, ia juga membuka ruang bagi berbagai bentuk instrumentalitas politik, termasuk manipulasi agama dalam bentuk populisme religius (Shakil & Yilmaz, 2021). Istilah ini, sebagaimana dibahas oleh Olivier Roy dan Jocelyne Cesari, mengacu pada praktik politik yang memanfaatkan simbol dan jargon keagamaan untuk kepentingan mobilisasi massa tanpa disertai komitmen mendalam terhadap nilai-nilai substantif agama itu sendiri.

Dalam populisme religius, agama direduksi menjadi alat legitimasi dan diferensiasi, bukan sebagai sumber pembebasan, pencerahan, atau rekonsiliasi sosial (Herianto & Wijanarko, 2022). Untuk itu, pendidikan Islam harus membekali peserta didik dengan kemampuan literasi kritis dan kesadaran etis agar tidak mudah terjebak dalam narasi-narasi eksklusif yang membelah masyarakat.

Fenomena populisme keagamaan di Indonesia terlihat jelas dalam berbagai peristiwa politik, terutama dalam Pilkada DKI Jakarta 2017, yang diwarnai oleh polarisasi tajam berbasis identitas keagamaan (Romli & Nurlia, 2023). Pengalaman ini menjadi pelajaran penting dalam pendidikan kewarganegaraan Islam, di mana demokrasi perlu dikawal oleh etika deliberasi dan bukan oleh dikotomi moral yang memecah-belah. Dalam kondisi seperti ini, pendidikan memainkan peran strategis untuk menyebarkan dakwah politik yang bermartabat, toleran, dan berbasis nalar etis, bukan sekadar emosi kolektif (Rahman, 2022).

Untuk itu, dibutuhkan model dakwah politik alternatif yang tidak bersandar pada pendekatan identiter-populis, melainkan pada pendekatan transformatif dan inklusif.

Model seperti ini telah ditunjukkan oleh organisasi-organisasi Islam moderat seperti Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah, yang secara historis mengembangkan dakwah bukan untuk merebut kekuasaan negara, tetapi untuk melakukan transformasi sosial melalui pendidikan, kesehatan, filantropi, dan advokasi kebangsaan (A. J. Kusuma et al., 2022). Kontribusi dakwah berbasis pendidikan ini harus dijadikan model dalam pengembangan kurikulum dan praktik pembelajaran Islam berbasis masyarakat madani.

NU, misalnya, mengusung konsep Islam Nusantara, yakni Islam yang berakar pada kebudayaan lokal, toleransi, dan semangat kebangsaan. Muhammadiyah mengembangkan Islam berkemajuan, sebuah gagasan modernis yang menekankan pentingnya rasionalitas, ilmu pengetahuan, dan amal sosial dalam pengamalan Islam. (Afifi, 2022). Kedua konsep ini sangat potensial untuk dimasukkan dalam materi pembelajaran PAI sebagai narasi Islam kontekstual yang sejalan dengan nilai-nilai kebangsaan.

Dalam perspektif teoretis, pendekatan ini juga sejalan dengan gagasan public religion dari Jose Casanova, yang menyatakan bahwa agama tidak lagi terkunci di ruang privat, tetapi memiliki legitimasi untuk hadir di ruang publik selama ia mampu bersikap inklusif, rasional, dan konstruktif. Sebaliknya, jika agama dibawa ke ruang publik hanya untuk memonopoli kebenaran, menegasikan yang lain, dan memperalat simbol untuk kepentingan dominasi politik, maka ia justru akan kehilangan legitimasi moralnya di hadapan masyarakat yang semakin majemuk dan kritis (Hidayah, 2020). Pendidikan harus mampu memperkenalkan paradigma ini agar peserta didik tidak terjebak dalam semangat eksklusif, tetapi justru menjadi agen etika dan pencerahan publik.

Melalui pendekatan ini, dakwah politik tidak lagi dimaknai sebagai mobilisasi umat demi kekuasaan, tetapi sebagai partisipasi aktif dalam pembentukan masyarakat madani yang adil, setara, dan berkeadaban. Dakwah dalam kerangka demokrasi kontemporer adalah dakwah yang mengedukasi, memediasi, dan menginspirasi, bukan mendikte, menghakimi, atau mengkafirkan. Ia membangun narasi Islam yang ramah terhadap perbedaan, terbuka terhadap perubahan, dan berakar pada etika profetik yang membela yang lemah dan menegakkan keadilan (Ridho & Hariyadi, 2021). Hal ini sangat relevan untuk dikembangkan dalam pendidikan karakter Islami, terutama dalam penguatan nilai-nilai profetik seperti keadilan, kasih sayang, dan kesetaraan.

Dengan demikian, reaktualisasi dakwah politik di era demokrasi Indonesia memerlukan keberanian epistemik untuk meninggalkan pendekatan simbolik-formalis menuju pendekatan substantif-transformasional. Lembaga pendidikan Islam harus diposisikan sebagai pusat produksi pengetahuan baru yang inklusif, kontekstual, dan etis dalam menjawab tantangan demokrasi multikultural. Islam harus diposisikan sebagai kekuatan etik yang membebaskan dan membangun, bukan alat eksklusivisme identitas. Islam harus hadir bukan sebagai identitas pembeda yang eksklusif, tetapi sebagai etika sosial yang membebaskan dan membangun. Dalam kerangka ini, demokrasi bukanlah antitesis Islam, melainkan ruang berharga untuk mengaktualisasikan maqāṣid al-syari'ah: keadilan, kemaslahatan, kebebasan berpikir, dan kesejahteraan umat.

Perlu dipahami bahwa dakwah politik, sebagai bagian dari partisipasi umat Islam dalam demokrasi, dapat mengikuti berbagai pendekatan yang memiliki dampak signifikan terhadap struktur sosial dan politik. Salah satu perbedaan penting dalam dakwah politik ini terletak pada model yang dipilih antara model populis yang berfokus pada mobilisasi massa dengan pendekatan eksklusif dan identiter, dan model transformatif yang mengedepankan dialog, inklusivitas, serta upaya membangun masyarakat madani yang lebih adil dan sejahtera (Jubaedah, 2022).

Tabel berikut ini akan menggambarkan perbandingan yang lebih mendalam antara kedua model tersebut, dengan menekankan aspek tujuan, pendekatan, bahasa, relasi dengan negara, ciri utama, representasi tokoh, dan konsekuensi sosial yang ditimbulkan. Melalui pendekatan pedagogis ini, peserta didik dapat dilatih untuk menganalisis perbedaan paradigma dakwah secara kritis dan objektif.

**Tabel 1. Perbandingan: Dakwah Populis vs Dakwah Transformatif dalam Demokrasi**

Aspek	Dakwah Populis (Shofan, 2019)	Dakwah Transformatif (Muhyiddin, 2019)
Tujuan	Mobilisasi politik untuk kekuasaan jangka pendek	Transformasi sosial jangka panjang berbasis nilai
Pendekatan	Emotif, identiter, eksklusif	Rasional, inklusif, etik
Bahasa dan Retorika	Polarisasi "kita vs mereka"; penggunaan simbol agama dangkal	Dialog, edukatif, reflektif
Relasi dengan Negara	Konfrontatif, berpotensi anti-demokrasi	Kolaboratif, memperkuat institusi demokrasi
Ciri Utama	Reduksi agama menjadi alat mobilisasi	Pemaknaan agama sebagai sumber etika dan keadaban
Representasi Tokoh	Hizbut Tahrir, FPI, gerakan Islam identiter	NU, Muhammadiyah, Jaringan Intelektual Muslim Progresif
Konsekuensi Sosial	Fragmentasi sosial, intoleransi, disintegrasi	Kohesi sosial, peningkatan literasi publik, penguatan civil society

Tabel ini menyajikan gambaran yang jelas tentang perbedaan antara dua pendekatan dakwah politik yang sangat berpengaruh dalam perkembangan kehidupan politik Indonesia pascareformasi. Model dakwah populis cenderung mengandalkan retorika yang memecah belah dan mempergunakan agama untuk tujuan politik jangka pendek, sedangkan dakwah transformatif berusaha menciptakan masyarakat yang lebih

adil, inklusif, dan beradab dengan menekankan nilai-nilai etika Islam yang universal dan humanistik.

Dalam memahami dinamika dakwah politik di era demokrasi kontemporer, sangat penting merujuk pada pemikiran sejumlah intelektual terkemuka dunia dan Indonesia yang telah banyak menyumbangkan analisis mendalam tentang relasi antara agama dan politik dalam ruang publik modern. Salah satu pemikir global yang paling berpengaruh dalam kajian Islam politik adalah (Roy, 2020), yang dalam karyanya *The Failure of Political Islam* menegaskan bahwa gerakan Islamis cenderung menggunakan simbol-simbol agama secara dangkal untuk kepentingan kekuasaan. Bagi Roy, Islam politik telah kehilangan substansi spiritualnya karena lebih mengedepankan bahasa kekuasaan ketimbang kesalehan yang otentik. Pandangan ini beresonansi dengan kritik terhadap populisme keagamaan yang menjadikan agama sebagai alat mobilisasi politik jangka pendek tanpa komitmen pada nilai-nilai etikanya.

Senada dengan itu, José Casanova menekankan bahwa agama tetap dapat hadir di ruang publik demokratis, asalkan mengikuti norma-norma deliberatif dan menjunjung prinsip kebersamaan (Reuter, 2019). Bagi Casanova, agama yang bersedia bersaing secara rasional dan inklusif dalam arena publik justru dapat memperkaya demokrasi. Pandangan ini menemukan relevansi besar dalam konteks Indonesia, di mana kebebasan pasca-reformasi membuka ruang luas bagi ekspresi keagamaan, termasuk dalam bentuk dakwah politik yang etis.

Lebih lanjut, Asef Bayat menawarkan pendekatan progresif yang memadukan antara iman dan kebebasan, antara religiositas dan hak-hak sipil (Almassry, 2021). Baginya, post-Islamisme adalah bentuk transformasi gerakan Islam yang tidak lagi terobsesi pada formalisasi syariat atau negara Islam, melainkan lebih fokus pada penguatan nilai-nilai keadilan sosial, pluralitas, dan demokrasi substantif. Dalam konteks ini, dakwah politik idealnya mengarah pada pemberdayaan masyarakat, bukan sekadar perebutan kekuasaan.

Gagasan-gagasan tersebut menemukan padanannya dalam pemikiran para cendekiawan Muslim Indonesia seperti Nurcholish Madjid dan Ahmad Syafi'i Ma'arif, yang secara konsisten memperjuangkan rekonsiliasi antara Islam dan demokrasi. Nurcholish Madjid, menolak gagasan negara Islam formal dan menegaskan bahwa esensi Islam bukan terletak pada simbol institusional, melainkan pada nilai-nilai universal seperti keadilan, kejujuran, dan tanggung jawab sosial (Yufriadi et al., 2023). Sementara itu, Syafi'i Ma'arif menyebutkan bahwa Pancasila adalah titik temu antara aspirasi religius umat Islam dan realitas pluralitas bangsa Indonesia (Cuaca, 2023). Dengan demikian, pendidikan menjadi medium utama dalam membumikan dakwah politik yang humanis, moderat, dan berakar pada nilai-nilai maqāsid al-syari'ah.

### **Reaktualisasi Dakwah Politik Menuju Islam Substantif**

Reaktualisasi Dalam dinamika politik Indonesia yang semakin kompleks, reaktualisasi dakwah politik menjadi sangat penting untuk memperbaharui dan

memperdalam pemahaman serta praktik-praktik keislaman dalam ruang publik dan politik. Dakwah politik, yang pada awalnya lebih sering terjebak dalam ruang wacana legalistik dan formalistik, kini menghadapi tantangan baru yang mengharuskan adanya pergeseran paradigma yang fundamental (Rohim, 2024). Transformasi ini sangat relevan untuk dijadikan sebagai fondasi dalam pengembangan kurikulum pendidikan Islam, khususnya dalam membekali peserta didik agar mampu membedakan antara simbol agama dan nilai-nilai esensial yang dapat diterapkan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Selama beberapa dekade terakhir, ekspresi politik Islam di Indonesia cenderung terfokus pada upaya formalisasi hukum-hukum Islam dalam struktur negara. Pendekatan ini, meskipun memiliki niat baik dalam menjaga kemurnian ajaran Islam, seringkali terjebak pada pembacaan yang sempit dan terfokus pada penerapan hukum-hukum syariah dalam konteks negara. Tidak sedikit yang melihat keberhasilan dakwah politik sebagai pencapaian dalam bentuk pengesahan peraturan daerah (perda) syariah atau penguatan regulasi tentang halal, sementara substansi dari ajaran Islam yang lebih luas seringkali terabaikan (Syatar et al., 2021). Kondisi ini menjadi tantangan sekaligus peluang bagi lembaga pendidikan Islam untuk membentuk perspektif keagamaan siswa yang tidak terjebak pada formalisme hukum, tetapi lebih pada pemahaman spiritual dan etika sosial yang membumi.

Sebaliknya, dakwah politik yang berbasis pada Islam substantif menawarkan pendekatan yang jauh lebih mendalam dan kontekstual. Pandangan ini mengajukan bahwa Islam sejatinya tidak hanya terbatas pada ritual atau hukum-hukum yang diinstitusionalisasikan dalam bentuk perda atau peraturan, tetapi lebih pada bagaimana nilai-nilai universal Islam seperti keadilan, kejujuran, tanggung jawab sosial, dan penghormatan terhadap martabat manusia dapat diinternalisasikan dan diwujudkan dalam setiap aspek kehidupan politik dan sosial (Hakim et al., 2025). Dalam konteks pendidikan, nilai-nilai ini seharusnya diintegrasikan dalam proses pembelajaran akhlak, fiqh siyasah, serta pendidikan kewarganegaraan berbasis Islam, guna membangun karakter peserta didik yang mampu menjadi agen perubahan sosial dalam masyarakat demokratis.

### **1. Pendekatan Substantif-Transformasional: Perspektif Intelektual Muslim Progresif**

Paradigma dakwah politik substantif ini sangat sejalan dengan gagasan-gagasan intelektual Muslim progresif seperti Nurcholish Madjid dan Mohammad Arkoun. Madjid, dengan visinya tentang "*Islam yang terbuka*" dan pluralisme, menekankan bahwa Islam tidak dapat disakralkan dalam bentuk institusional kekuasaan, melainkan harus dilihat sebagai sumber nilai etik dan moral yang memperkaya kehidupan sosial-politik (Midjar, 2022). Sementara itu, Arkoun dengan pendekatannya yang lebih filosofis, menolak pemahaman Islam yang sempit dan mengajak umat untuk melihat ajaran agama secara kontekstual sesuai dengan dinamika sosial dan tantangan zaman (Manshur, 2023).

Keduanya sepakat bahwa Islam dalam politik bukanlah sebuah sistem yang harus diimposisikan dalam bentuk negara teokratis, tetapi sebagai sumber dari etika publik

yang berorientasi pada kesejahteraan bersama dan keadilan sosial. Pemikiran ini dapat dimanfaatkan sebagai bahan ajar dalam mata kuliah pemikiran Islam kontemporer atau pendidikan Islam dan demokrasi di tingkat pendidikan tinggi keagamaan. Dengan demikian, peserta didik dilatih berpikir kritis, kontekstual, dan inklusif dalam memahami relasi Islam dan kekuasaan.

Dalam konteks ini, dakwah politik substantif tidak hanya terfokus pada permasalahan internal umat Islam atau identitas keagamaan. Dakwah politik yang terbuka dan progresif harus mampu mengatasi berbagai isu besar yang dihadapi oleh bangsa Indonesia, seperti ketimpangan sosial, kemiskinan struktural, korupsi yang mengakar, kerusakan lingkungan, serta intoleransi dan radikalisme yang semakin merebak (Hakim et al., 2025). Isu-isu ini merupakan tantangan global yang memerlukan pendekatan politik yang lebih inklusif dan solutif. Dakwah yang hanya berputar pada isu-isu ritualistik seperti aurat atau perzinahan, tanpa menyentuh akar-akar ketidakadilan sosial dan eksploitasi, hanya akan memperkuat formalisasi keagamaan yang kering dan tidak membumi.

## 2. Konteks Kontemporer: Dakwah Politik sebagai Suara Kenabian

Dakwah politik harus hadir sebagai suara kenabian, sebuah suara yang mengingatkan kekuasaan, menegur ketidakadilan, dan membela kelompok tertindas. Dalam tradisi kenabian, dakwah politik mengarah pada upaya perubahan sosial yang adil dan bermartabat. Dakwah politik yang substantif mencakup kritik terhadap struktur sosial yang timpang dan usaha memperbaiki kehidupan masyarakat secara lebih holistik. Dalam konteks ini, dakwah bukanlah soal mendominasi atau menundukkan orang lain dalam kekuasaan, melainkan tentang memberikan pelayanan, mengutamakan kesejahteraan, dan memperjuangkan hak-hak yang tertindas (Kurniawan et al., 2025).

Aspek ini dapat dikembangkan dalam pembelajaran sejarah kenabian (*sirah*) dan tarikh khilafah untuk menunjukkan bahwa para nabi dan khalifah bukan hanya pemimpin spiritual, tetapi juga agen transformasi sosial. Pendidikan Islam yang mengadopsi pendekatan ini akan melatih peserta didik untuk memahami dakwah sebagai proses perubahan sosial yang berlandaskan pada nilai-nilai keadaban, bukan sekadar penyebaran dogma.

## 3. Perbandingan Tiga Pendekatan Dakwah Politik

Untuk memudahkan pemahaman tentang reaktualisasi dakwah politik, tabel di bawah ini menyajikan perbandingan antara tiga pendekatan utama dakwah politik yang sering muncul dalam wacana kontemporer di Indonesia: normatif-legalistik, populis-ideologis, dan substantif-transformasional. Setiap pendekatan memiliki karakteristik yang berbeda dalam kaitannya dengan tujuan, retorika, dan keterlibatan dalam politik.

**Tabel 2. Perbandingan Pendekatan Dakwah Politik Islam di Indonesia (Razzaq, 2020)**

Aspek	Normatif-Legalistik	Populis-Ideologis	Substantif-Transformasional
Tujuan Utama	Formalkan syariat ke dalam struktur hukum dan negara	Mobilisasi massa melalui simbol dan narasi identitas Islam	Internalisasi nilai-nilai Islam dalam sistem sosial-politik secara etis dan inklusif
Fokus Utama	Hukum Islam, perda syariah, simbol keislaman	Isu identitas, politik elektoral, dikotomi "Islam vs musuh Islam"	Etika politik, keadilan sosial, penguatan masyarakat sipil
Basis Teologis	Tafsir fiqih klasik dan nash formal	Ayat/jargon agama yang disederhanakan untuk mobilisasi	Maqashid al-syari'ah, teologi kontekstual, Islam rahmatan lil 'alamin
Ciri Retorika	Tekanan pada kewajiban menegakkan hukum Tuhan	Retorika emosional, polarisasi, penggiringan sentimen umat	Narasi etis, argumentasi rasional, solusi sosial konstruktif
Keterlibatan Politik	Terlibat melalui partai berbasis agama untuk memperjuangkan perda/hukum Islam	Terlibat dalam kontestasi politik dengan pendekatan identitas dan massa	Terlibat dalam penguatan demokrasi substantif dan advokasi sosial
Relasi dengan Demokrasi	Ambivalen: diterima jika tidak bertentangan dengan syariah	Skeptis, memanfaatkan demokrasi untuk tujuan non-demokratis	Positif: demokrasi dilihat sebagai sarana menegakkan nilai-nilai Islam
Kelebihan	Konsisten dengan sebagian teks keagamaan klasik	Efektif menjangkau akar rumput secara emosional	Adaptif, solutif, membumi dalam realitas masyarakat
Kelemahan	Tidak kontekstual, cenderung kaku, berpotensi eksklusif	Reduktif, eksploitasi simbol agama, mudah terjebak dalam radikalisme	Kurang populer secara elektoral, menuntut kapasitas intelektual dan etika tinggi

Tabel tersebut tidak hanya menggambarkan lanskap dakwah di Indonesia, tetapi juga dapat digunakan sebagai instrumen pembelajaran reflektif dalam kelas-kelas pendidikan politik Islam atau mata pelajaran PAI. Dari sudut pandang pendidikan, tabel ini bisa dijadikan media diskusi kelas untuk menganalisis secara kritis pendekatan dakwah yang ideal dalam konteks Indonesia.

#### 4. Harapan Masa Depan

Pendekatan substantif-transformasional, meskipun tidak sepopuler pendekatan populis dalam ranah elektoral, memiliki daya tarik dan relevansi yang luar biasa dalam menciptakan peradaban politik yang lebih berkelanjutan dan inklusif (Syarifah, 2019). Untuk merealisasikan hal ini, lembaga pendidikan Islam memiliki peran sentral sebagai agen perubahan dengan mempromosikan nilai-nilai Islam yang solutif, adaptif, dan kontekstual melalui pendekatan interdisipliner antara agama, politik, dan sosiologi.

Selain itu, perkembangan teknologi digital membuka ruang baru untuk dakwah yang lebih luas, memungkinkan para juru dakwah untuk menjangkau audiens yang lebih besar dan membangun kesadaran kolektif tentang isu-isu penting yang dihadapi oleh masyarakat. Pendidikan Islam perlu mengembangkan literasi digital religius (*religious digital literacy*) agar generasi muda dapat berdakwah secara cerdas, etis, dan konstruktif di ruang digital.

Dengan cara ini, reaktualisasi dakwah politik menuju Islam substantif tidak hanya menuntut perubahan wacana keagamaan, tetapi juga transformasi paradigma pendidikan Islam di Indonesia. Melalui integrasi nilai-nilai *maqāṣid al-syarī'ah* ke dalam kurikulum, penguatan literasi politik-keislaman, dan pembelajaran yang reflektif serta kontekstual, lembaga pendidikan dapat menjadi lokomotif perubahan menuju dakwah yang lebih etis, membebaskan, dan membangun peradaban.

#### Implikasi Hasil Penelitian

Secara praktis, temuan dalam penelitian ini memberikan kontribusi signifikan sebagai pedoman strategis bagi para dai, aktivis ormas Islam, pendidik, serta aktor politik Muslim dalam merancang model dakwah politik yang lebih kontekstual, moderat, dan transformatif. Dalam konteks masyarakat Indonesia yang plural dan demokratis, praktik dakwah politik yang edukatif dan kolaboratif tidak hanya mampu meningkatkan literasi dan kesadaran politik umat, tetapi juga menjadi sarana penting dalam memperkuat kohesi sosial, toleransi, dan kedewasaan berdemokrasi.

Implikasi ini sangat relevan dalam dunia pendidikan Islam, baik formal (madrasah, pesantren, perguruan tinggi keagamaan) maupun nonformal. Lembaga pendidikan dapat mengadopsi hasil penelitian ini untuk:

1. Mengembangkan kurikulum dakwah politik yang berbasis nilai-nilai *maqashid al-syar, 'ah* dan etika profetik.

2. Menyusun materi pembelajaran PAI dan Fikih Siyash yang tidak hanya fokus pada aspek normatif-formal hukum Islam, tetapi juga pada dimensi etis, sosial, dan politik Islam yang membumi.
3. Mendorong diskusi kritis dan dialog antarmazhab pemikiran dalam ruang kelas agar peserta didik terbiasa memahami keberagaman dalam Islam, serta mampu menilai isu-isu politik-keagamaan secara rasional dan reflektif.

Secara teoretis, artikel ini memperkaya *khazanah* literatur dakwah politik Islam kontemporer dengan menawarkan pendekatan integratif antara idealisme normatif Islam dan prinsip-prinsip demokrasi konstitusional. Melalui pemaknaan ulang terhadap konsep khilafah dan demokrasi, baik secara simbolik maupun substantif, penelitian ini menghadirkan alternatif epistemologis yang dapat dimanfaatkan oleh dosen, guru, dan peneliti dalam pengajaran politik Islam dan pemikiran Islam kontemporer. Hal ini penting untuk menjembatani dikotomi ideologis yang selama ini dianggap kontradiktif antara Islam dan demokrasi dalam wacana pendidikan Islam.

Dalam aspek metodologis, penelitian ini menegaskan relevansi pendekatan kualitatif-deskriptif berbasis studi pustaka dalam menggali isu-isu dakwah politik secara mendalam dan reflektif. Metode ini sangat cocok untuk digunakan dalam pengajaran riset keislaman, terutama dalam mata kuliah metodologi studi Islam, sebagai contoh aplikasi nyata bagaimana analisis literatur dapat menghasilkan pemahaman komprehensif terhadap isu sosial-keagamaan yang kompleks.

Di saat yang sama, hasil penelitian ini juga membuka ruang bagi penelitian pendidikan berbasis lapangan (empiris) untuk:

1. Mengevaluasi implementasi nilai-nilai dakwah politik progresif di lembaga pendidikan Islam.
2. Menilai efektivitas kurikulum dakwah dalam membentuk kesadaran politik yang moderat dan inklusif.
3. Mengembangkan model pendidikan politik Islam yang membumikan nilai-nilai keadilan sosial, partisipasi publik, dan etika kepemimpinan Islami dalam masyarakat multikultural.

Dengan demikian, temuan dalam penelitian ini dapat menjadi referensi akademik, rujukan kurikulum, dan inspirasi pedagogis dalam mendorong peran pendidikan Islam sebagai pilar utama dalam mengarusutamakan dakwah politik yang membangun, inklusif, dan etis di tengah tantangan demokrasi Indonesia masa kini.

## KESIMPULAN

Reaktualisasi dakwah politik di Indonesia merupakan sebuah keniscayaan dalam menjawab dinamika kontemporer umat Islam yang hidup dalam sistem negara demokratis dan masyarakat multikultural. Warisan khilafah, meskipun memiliki nilai historis dan spiritual yang penting, tidak dapat dijadikan acuan literal dalam konteks kenegaraan Indonesia tanpa mempertimbangkan kompleksitas sosial, politik, dan hukum

yang berkembang. Oleh karena itu, pemahaman terhadap khilafah perlu didefinisikan secara substantif sebagai etika kepemimpinan Islam yang menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan (*'adl*), akuntabilitas (*amanah*), dan musyawarah (*syura*).

Demokrasi di Indonesia telah menyediakan ruang yang luas bagi ekspresi keislaman dalam bentuk dakwah politik. Namun, agar ruang ini produktif dan konstruktif, narasi dakwah yang dikembangkan harus menghormati pluralitas, mengedepankan moderasi, serta menghindari dominasi ideologis yang eksklusif. Dakwah politik dalam sistem demokrasi semestinya tidak menjadi alat hegemoni wacana keagamaan, tetapi harus bertransformasi menjadi instrumen edukasi sosial, dialog kebangsaan, dan pemberdayaan umat.

Islam substantif menawarkan jalan tengah strategis dalam mengintegrasikan ajaran Islam ke dalam praktik politik modern. Pendekatan ini bukan hanya membumikan nilai-nilai syariah secara kontekstual, tetapi juga mengarahkan dakwah politik pada penguatan etika publik, pengarusutamaan isu-isu sosial seperti kemiskinan, korupsi, dan ketimpangan, serta pembangunan masyarakat madani yang adil dan beradab. Dengan demikian, dakwah politik tidak sekadar mengusung ideologi, melainkan menjadi bagian dari upaya kolektif menciptakan tatanan sosial yang selaras dengan prinsip *maqāsid al-sharī'ah*.

Dalam konteks pendidikan, temuan ini memberikan implikasi penting: pendidikan Islam perlu direorientasikan agar mampu melahirkan generasi Muslim yang cerdas secara politik, inklusif secara sosial, dan berakar secara spiritual. Kurikulum madrasah, pesantren, dan perguruan tinggi Islam harus mengintegrasikan nilai-nilai dakwah substantif dalam materi ajar, seperti pada mata pelajaran fikih siyasah, pemikiran Islam kontemporer, dan pendidikan kewarganegaraan berbasis nilai-nilai Islam. Selain itu, guru dan dosen perlu mendorong pendekatan pembelajaran kritis-reflektif agar peserta didik memahami peran Islam dalam demokrasi secara etis dan aplikatif.

Penelitian ini tentu tidak lepas dari sejumlah keterbatasan yang perlu dicermati sebagai fondasi bagi pengembangan kajian selanjutnya. *Pertama*, pendekatan konseptual-reflektif yang digunakan belum menangkap dinamika empiris dakwah politik di tingkat akar rumput, termasuk praktik di lingkungan sekolah dan pesantren. *Kedua*, peran strategis institusi pendidikan Islam seperti madrasah, pesantren, dan sekolah tinggi keagamaan dalam membentuk kesadaran politik yang moderat dan inklusif belum tergali secara mendalam. *Ketiga*, belum adanya keterlibatan langsung dengan para pelaku dakwah politik di lapangan menjadi celah penting dalam memahami strategi, tantangan, dan narasi dakwah yang berkembang secara aktual.

Merespons keterbatasan tersebut, penelitian lanjutan sangat dianjurkan menggunakan pendekatan lapangan (*field research*), khususnya dengan studi kasus di lembaga pendidikan Islam atau komunitas dakwah lokal. Pendekatan interdisipliner yang menggabungkan studi Islam, pendidikan, komunikasi dakwah, dan ilmu politik juga sangat diperlukan guna memperluas wawasan teoretis dan memperdalam pemahaman

terhadap reaktualisasi dakwah politik dalam kehidupan sosial, politik, dan budaya masyarakat Indonesia yang terus berkembang.

Dengan demikian, pendidikan menjadi elemen kunci dalam memastikan bahwa dakwah politik di masa depan tidak hanya bermuatan ideologis, tetapi juga berdaya transformasi, berbasis nilai, dan berkontribusi bagi pembangunan peradaban yang adil, damai, dan berkeadaban.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Abas, Z., & Gulerce, H. (2025). Integrating Islam with Humanity and Indonesian Identity: Perspectives of Nurcholish Madjid and Ahmad Syafii Maarif. *Journal of Islamic Thought and Civilization*, 15(1), 335–351.
- Abdillah, M. T. (2024). Relevansi Nilai-Nilai Etika Politik dan Konsep Moderasi Beragama dalam Tafsir al-Qurthubi: Refleksi Menyambut Pemilu 2024. *AL-MURABBI: Jurnal Studi Kependidikan Dan Keislaman*, 10(2), 35–49.
- Afifi, E. (2022). Islam Nusantara: Islam & Nasionalisme. *AL-KAINAH: Journal of Islamic Studies*, 1(1), 73–91. <https://doi.org/10.69698/jis.v1i1.7>
- Ahmad, A. (2019). *Ibn Khaldun and The Fall of Khilafah*. Islami.Co. <https://en.islami.co/ibn-khaldun-and-the-fall-of-khilafah/>
- Almassry, H. (2021). *Transformations of Political Islam: a Reading of Asef Bayat's Concept of Post-Islamism*. <https://doi.org/10.48150/jlah.v2no9.2021.a3>
- April, V. N., Atqiya, A. N., Muhammad, A., Nasoha, M., Azka, A. D., Az-zahra, Q., & Rahmawati, D. A. (2025). *Peran Dakwah Islam dalam Membangun Kesadaran Kewarganegaraan di Era Digital Program Pasca Sarjana , Universitas Sebelas Maret , Indonesia Universitas Negeri Islam Raden Mas Said Surakarta , Indonesia masyarakat yang harmonis , adil , dan bertanggung jawab*. April.
- Aprilya, P. K., & Tohawi, A. (2024). Implementasi Prinsip Syura dalam Sistem Pemerintahan Daerah. *Islamic Law: Jurnal Siyasah*, 9(1), 1–15.
- Bistara, R. (2021). Khilafah Vis A Vis Demokrasi: Menguak Sistem Pemerintahan Negara Plural yang Mayoritas Penduduknya Muslim. *Politea*, 4(1), 95.
- Cuaca, A. M. (2023). Buya Syafii: Suluh Bangsa, Sang Pluralis Indonesia. *Maarif*, 18(1), 73–87. <https://doi.org/10.47651/mrf.v18i1.211>
- Dalmeri, D. (2023). Dinamika Formalisasi Syariat Islam di Indonesia Dalam Konteks Pancasila. *Tadarus Tarbawy : Jurnal Kajian Islam Dan Pendidikan*, 5(1), 61–76. <https://doi.org/10.31000/jkip.v5i1.8698>
- Hakim, L., Syifa'urrahman, M., Halim, A., Uyuni, B., Mashud, S., Khuzaefi, M., Nuriyah, S., Sholihat, N., Wardani, R., & Sinaga, Y. (2025). *Pengembangan Budaya Dakwah Melalui Tulisan di Kalangan Pendakwah Milenial* (p. 176).
- Hanif, D. (2022). Analisis Fiqh Siyasah Tentang Khilafah Menurut Al-Mawardi Dalam Kitab Al-Ahkam As-Shulthaniyyah. *Jurnal Lex Renaissance*, 7(1), 153–166. <https://doi.org/10.20885/jlr.vol7.iss1.art12>
- Hawi, A. (2019). Prinsip-prinsip Islam tentang demokrasi: Studi pemikiran Nurcholish Madjid tahun 1970-2005. *Medina-Te: Jurnal Studi Islam*, 15(1), 108–133.

- Herianto, H., & Wijanarko, R. (2022). Populisme Berwajah Politik Identitas Keagamaan di Indonesia. *Jurnal Filsafat Indonesia*, 5, 53–64. <https://doi.org/10.23887/jfi.v5i1.39581>
- Hidayah, I. (2020). *REGULASI POLITIK PAKAIAN MUSLIMAH DI RUANG PUBLIK*. UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA.
- Jauhari, M., Suryandaru, Y. S., & Sugihartati, R. (2021). Dialektika Khilafah dan Politik Kebangsaan dalam Media Publik Siber. *Religious: Jurnal Studi Agama-Agama Dan Lintas Budaya*, 5(2), 199–216.
- Jubaedah, E. (2022). *KONSTRUKSI POPULISME AGAMA DALAM DEMOKRASI PANCASILA BERDASARKAN PERSPEKTIF PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN*. Universitas Pendidikan Indonesia.
- Kurniawan, R., Firdaus, M., & Yakub, M. (2025). Strategi Dakwah Lembaga Politik Islam dalam Mensyiarkan Agama Islam. *Tabsyir: Jurnal Dakwah Dan Sosial Humaniora*, 6, 279–288. <https://doi.org/10.59059/tabsyir.v6i2.2254>
- Kusuma, A. J., Rahmawati, R., & Fathun, L. O. M. (2022). Model Islam Inklusif Di Indonesia Sebagai Kajian Kritik Terhadap Teori “Clash Of Civilizations” Samuel P. Huntington. *Journal of Political Issues*, 3(2), 62–76. <https://doi.org/10.33019/jpi.v3i2.71>
- Kusuma, D. W. (2025). *Khilafah Sebagai Sistem Pemerintahan*. 3(2), 259–269.
- Manshur, F. M. (2023). Kritik Rasionalisme Mohammed Arkoun terhadap Budaya Intelektual Arab-Islam. *Tajdid*, 30(1), 1. <https://doi.org/10.36667/tajdid.v30i1.1161>
- Marzuki, I. (2021). Diskursus Khilafah dalam Kajian Fiqh Siyasah Klasik dan Kontemporer. *Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam*, 15(2), 325–344.
- Midiar, H. (2022). *Pemikiran Nurcholish Madjid Tentang Pluralitas Beragama*. 3(2), 1–29.
- Muhyiddin, A. S. (2019). Dakwah Transformatif Kiai (Studi terhadap Gerakan Transformasi Sosial KH. Abdurrahman Wahid). *Jurnal Ilmu Dakwah*, 39(1), 1–14.
- Munabari, F., Larasati, N. U., & Ihsan, R. (2020). Islamic revivalism in Indonesia: The caliphate, sharia, NKRI, democracy, and the nation-state. *Jurnal Politik*, 5(2), 5.
- Murtadha, A. (2022). *PANDANGAN AZYUMARDI AZRA TENTANG HUBUNGAN ISLAM DAN NEGARA DALAM SISTEM PEMERINTAHAN INDONESIA*.
- Nasuhaidi, N., & Subekti, D. (2024). POLA KEKUATAN PARTAI POLITIK ISLAM INDONESIA DALAM PEMILU DI ERA REFORMASI. *JISIP UNJA (Jurnal Ilmu Sosial Ilmu Politik Universitas Jambi)*, 82–94.
- Ningsih, W. L. (2022). *Sistem Pemerintahan Bani Umayyah*. Kompas.Com.
- Nurfalah, M. T. (2022). *KONSEP KHILAFAH-KULTURAL SIVILISASIONAL DIN SYAMSUDDIN DALAM PERSPEKTIF HERMENEUTIKA JORGE J.E. GRACIA*.
- Rachman, M. T. (2020). *Agama dan Politik Identitas dalam Kerangka Sosial*.
- Rahman, A. (2022). REORIENTASI ISLAM INKLUSIF DALAM MEWUJUDKAN MASYARAKAT MADANI INDONESIA DI ERA DEMOKRASI DELIBERATIF1. *NUSANTARA: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*, 9(10), 3822–3832.
- Razzaq, A. (2020). *DINAMIKA DAKWAH DAN POLITIK DALAM PEMIKIRAN ISLAM*

- MODERNIS DI INDONESIA. *Wardah*, 15, 7–15.  
<https://doi.org/10.19109/wardah.v15i1.202>
- Reuter, A. (2019). *José Casanova: Public Religions in the Modern World (1994) BT - Schlüsselwerke der Religionssoziologie* (C. Gärtner & G. Pickel (eds.); pp. 449–458). Springer Fachmedien Wiesbaden. [https://doi.org/10.1007/978-3-658-15250-5\\_50](https://doi.org/10.1007/978-3-658-15250-5_50)
- Ridho, A. R., & Hariyadi, M. (2021). Reformulasi etika dakwah berbasis komunikasi profetik dalam Al-Qur'an. *Komunike*, 13(1), 53–78.
- Rohim, A. (2024). Dakwah Islam Moderat dan Realitas Politik di Indonesia. *Ad-DA'WAH*, 22, 17–33. <https://doi.org/10.59109/addawah.v22i1.60>
- Romli, O. R., & Nurlia, E. (2023). Menimbang isu politik identitas pada pilkada DKI Jakarta tahun 2024. *Jurnal Ilmu Politik Dan Pemerintahan*, 9(2).
- Roy, O. (2020). The Failure of Political Islam Revisited. *Dalam Mohamed Nawab Mohamed*.
- Shakil, K., & Yilmaz, I. (2021). Religion and Populism in the Global South: Islamist Civilisationism of Pakistan's Imran Khan. *Religions*, 12, 777.  
<https://doi.org/10.3390/rel12090777>
- Shofan, M. (2019). *Populisme Islam Dan Tantangan Demokrasi Islam Di Indonesia.// Maarif* 14 (1): 3–8.
- Suhaimi, A., & Amin, M. (2022). Pendidikan Politik Dakwah Organisasi Masyarakat (Studi Analisis Konsep dan Komunikasi Dakwah Organisasi Masyarakat). *Edukasi Islami: Jurnal Pendidikan Islam*, 11(001).
- Syafuri, H. B. (2025). *Fiqih siyasah di era globalisasi*. Yayasan Al-Ma'aarij Darmaraja.
- Syarifah, C. (2019). Pancasila dan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan: Jalan Menuju Masyarakat Kosmopolitan. *Kedaulatan Indonesian Perspective*, 4(1), 21–39.
- Syatar, A., Juliana, J., Eitriya, Z., Rifaldi, R., Winanda, W., Anugrah, A., & Putri, A. (2021). FORMALISASI HUKUM ISLAM DALAM BENTUK PERATURAN DAERAH: ANALISIS PERATURAN DAERAH SYARIAH DI BULUKUMBA. *Bilancia: Jurnal Studi Ilmu Syariah Dan Hukum*, 15, 65–84. <https://doi.org/10.24239/blc.v15i1.681>
- Tanjung, I. U., & Rambe, M. J. (2023). Khilafah Islamiyah Versus Pancasila Studi Ideologi dan Penerapannya di Indonesia. *Scenario (Seminar of Social Sciences Engineering and Humaniora)*, 391–404.
- Wahyudi, A. S. (2024). *Peran Dakwah Dalam Menyadarkan Pentingnya Bersikap Prososial Bagi Masyarakat Medan Maimun*. 02(01), 13–19.
- Widoyo, A. F., & Islamy, A. (2022). Nilai-Nilai Maqasid Syariah dalam Orientasi Dakwah di Indonesia. *Risalah, Jurnal Pendidikan Dan Studi Islam*, 8(4), 1263–1275.
- Yufriadi, F., Syahriani, F., & Afifi, A. A. (2023). Nurcholish Madjid's Neo-Modernism in Substantive Islamic Movements in Indonesia. *Perwakilan: Journal of Good Governance, Diplomacy, Customary Institutionalization and Social Networks*, 1. <https://doi.org/10.58764/j.prwkl.2023.1.45>
- Yumitro, G. (2018). Peluang dan Tantangan Gerakan Revivalisme Islam di Indonesia Pascareformasi. *Tsaqafah*, 14(1), 55–72.